

Cina dan Asia Tenggara Pasca Kamboja

Rizal SUKMA

DEKADE 1990-an memang tepat disebut dekade yang akan diwarnai oleh berbagai perubahan dramatis. Inti perubahan interaksi antar *superpower* dalam sistem internasional, berupa upaya-upaya kompromi antara Amerika Serikat (AS) dan Uni Soviet (US), ikut menyebar ke berbagai kawasan dunia. Baik Washington maupun Moskow cenderung mengkaji ulang kebijaksanaan luar negeri mereka selama ini. Penarikan pasukan Soviet dari Afghanistan, kesepakatan-kesepakatan penghapusan, pengurangan, dan pembatasan persenjataan di antara keduanya merupakan contoh dari upaya peredaan ketegangan (*detente*) regional maupun global.

Di tengah perubahan yang sedang berlangsung dalam panggung hubungan internasional dewasa ini, persoalan stabilitas dan keamanan di Asia Tenggara masih tetap perlu mendapat perhatian. Upaya-upaya ASEAN untuk menyelesaikan konflik Kamboja -- sebagai salah satu sumber instabilitas di kawasan -- memang telah memunculkan kembali harapan baru karena keberhasilan yang dicapai pertemuan di Jakarta 9-11 Sep-

tember 1990. Namun, kawasan Asia Tenggara masih tetap potensial memunculkan persoalan-persoalan baru pasca konflik Kamboja. Dalam konteks ini kehadiran Cina sebagai kekuatan yang cukup berpengaruh atas keadaan di kawasan merupakan faktor yang sulit diabaikan. Sikapnya yang "konsisten" dalam memandang konflik Kamboja, khususnya mengenai keberadaan dan peranan Khmer Merah dan persaingannya dengan Vietnam, harus diakui telah membawa dilema bagi negara-negara ASEAN.

Di lain pihak, Cina bukanlah negara yang kedap dari pengaruh-pengaruh yang disebabkan perubahan-perubahan di lingkungan internasional. Sejak awal dekade 1980-an, pergeseran prioritas hirauan di dalam negeri -- dari politik-ideologi ke pembangunan ekonomi -- telah mendorong Beijing untuk melakukan penyesuaian politik luar negerinya, seiring dengan perubahan-perubahan yang terjadi di sekitarnya. Formulasi politik luar negeri independen pada bulan September 1982, misalnya, merupakan salah satu bentuk penyesuaian itu. Dari

berbagai studi juga terlihat kalau Cina kerap kali melakukan penyesuaian-penyesuaian taktis dalam politik luar negerinya.

Berbagai perubahan yang sedang berlangsung di Asia Tenggara sekarang ini kiranya akan memunculkan tantangan-tantangan kebijaksanaan baru bagi Cina. Bagaimana Cina menghadapi perubahan di Asia Tenggara ini? Apakah Cina akan mengadopsi kebijaksanaan yang lebih keras untuk mencegah dan mengurangi ambisi regional Vietnam? Atau, apakah Cina akan mencari pendekatan yang lebih fleksibel terhadap Asia Tenggara sebagai hasil dari kalkulasi rasional para pemimpinnya sekarang atas realitas politik yang berlaku di Asia Tenggara? Tantangan-tantangan apa yang akan dihadapi Indonesia dan ASEAN sebagai akibat dari perubahan-perubahan strategis di kawasan dan implikasinya terhadap peranan Cina di Asia Tenggara?

Untuk menjawab pertanyaan di atas, tulisan ini akan menyoroti empat pokok bahasan yang saling terkait: (a) posisi Cina dalam struktur perubahan di Asia Tenggara; (b) strategi Cina dalam menghadapi Vietnam dan ASEAN; (c) kecenderungan politik luar negeri Cina di Asia Tenggara; dan (d) beberapa catatan mengenai kebijaksanaan Indonesia dan ASEAN menghadapi perubahan di Asia Tenggara, terutama dalam kaitannya dengan faktor kehadiran Cina di kawasan ini.

Cina dan Asia Tenggara yang Berubah

Pada perspektif global, tatanan hubungan internasional di Asia tidak dapat dipisahkan dari perspektif interaksi segitiga kekuatan besar AS, RRC, dan US. Ketiga *great powers* tersebut sama-sama ingin tampil do-

minan dalam mengembangkan pengaruh masing-masing di kawasan. Hasrat untuk tampil sebagai kekuatan utama di Asia ini terutama lebih menonjol pada Cina. Beijing melihat kawasan ini sebagai wilayah lingkup pengaruhnya (*sphere of influence*) di mana melalui runutan historis RRC memandang dirinya sebagai pusat yang harus menjadi patron negara-negara Asia lainnya. Sedangkan AS dan US dilihat Beijing sebagai masing-masing telah memiliki lingkup pengaruh sendiri di Eropa Barat dan Eropa Timur. Namun, realitas bahwa AS dan US sebagai *global power* juga memiliki *global interests* mau tidak mau membuat Cina harus mengakui kehadiran kedua *superpower* itu di kawasan Asia.¹

Walaupun demikian, pengakuan terhadap peranan *global superpower* tidak menghalangi Cina untuk berusaha mencapai tujuan-tujuan utamanya di kawasan Asia Tenggara yang dipandang Beijing sebagai wilayah terpenting bagi keamanan karena kedekatan geografis. Cina menginginkan dirinya menjadi pusat pengaruh di Asia Tenggara.² Ketidakpastian di kawasan ini menyusul "kekalahan" AS dalam perang Indocina tahun 1975 dan penyerbuan Vietnam ke Kamboja akhir tahun 1978, mendorong Cina untuk mengambil posisi kunci di Asia Tenggara. Pertama, Cina menjalin perserikatan (*alignment*) dengan US untuk menangkal persekutuan (*alliance*) antara Soviet dan Vietnam. Kedua, Cina memberi dukungan moral dan material kepada kelompok Khmer Merah yang terpaksa melepaskan kekuasaan di Kamboja akibat intervensi Vietnam. Ketiga, kekhawatiran negara-negara

¹Rizal Sukma, "Segitiga AS-RRC-US Pasca Rujuk Sino-Soviet," *Media Indonesia*, 1 Juni 1989.

²Golam Choudhury, "Role of China in Asia," *Journal of East Asian Affairs*, vol. III, no. 1 (Spring/Summer 1983): 177.

Asia Tenggara non-komunis terhadap maksud-maksud Vietnam di Asia Tenggara telah mempermudah Cina untuk memupuk hubungan baik dengan ASEAN, khususnya dengan Thailand.

Hanya saja dalam konteks percaturan politik di Asia Tenggara, struktur persaingan dan kerjasama yang terbentuk semakin diperumit oleh keikutsertaan negara-negara kawasan dalam isu konflik Kamboja. Dengan demikian, penggambaran atas struktur hubungan di Asia Tenggara harus memberikan perhatian kepada Vietnam dan negara-negara ASEAN sebagai pihak yang ikut memainkan peranan penting. Dalam perspektif yang lebih kompleks ini, persoalan penting bagi RRC adalah bagaimana menempatkan dirinya pada posisi yang paling menguntungkan sehubungan dengan adanya faktor pembatas yang berasal dari persaingannya dengan Vietnam dan Uni Soviet.

Ketika Cina memberi "pelajaran" kepada Vietnam bulan Februari 1979, hubungan Hanoi-Moskow dilihat Beijing sebagai persekutuan anti-Cina yang sedang berusaha mengepungnya dan memberi peluang bagi perluasan maksud-maksud hegemoni Soviet di Asia Tenggara.³ Dalam suasana politik dan keamanan seperti ini, perserikatan dan kerjasama dengan AS dan ASEAN jelas memiliki arti strategis yang cukup penting bagi Cina. Kerangka pengaturan strategis itu kerap dimanfaatkan Cina untuk menekan Vietnam secara militer maupun diplomatik,⁴

³Charles McGregor, "China, Vietnam, and the Cambodian Conflict: Beijing's End Game Strategy," *Asian Survey*, vol. XXX, no. 3 (Maret 1990): 267.

⁴Salah satu contohnya adalah ketika penyerbuan RRC ke Vietnam yang dilakukan bertepatan dengan waktu kunjungan Deng Xiaoping ke Amerika Serikat. Secara demikian, Cina ingin memunculkan kesan bahwa tindakan penyerbuan itu "didukung" oleh AS.

memberi dukungan terhadap gerakan perlawanan anti-Vietnam di Kamboja, dan sekaligus mengembangkan hubungan ekonomi dan diplomatik dengan AS dan negara-negara ASEAN.⁵ Pilihan kebijaksanaan seperti ini dapat ditafsirkan sebagai upaya RRC untuk menghambat tampilnya Vietnam sebagai kekuatan berpengaruh di kawasan Asia Tenggara, yang pada gilirannya dapat merintangai hasrat Beijing untuk tampil sebagai satu-satunya kekuatan dominan di kawasan.⁶

Namun, sejak akhir dekade 1980-an terjadi serangkaian perubahan dalam peta politik regional Asia Tenggara yang membawa tantangan-tantangan baru bagi Cina. Pertama, *Cina tidak dapat lagi memainkan "kartu AS" dan "kartu Soviet" dalam kerangka politik segitiga AS-RRC-US dengan dimulainya peredaan ketegangan Washington-Moskow sejak awal tahun 1988.* Cara pandang AS terhadap Cina juga mengalami perubahan. Ketergantungan modernisasi RRC pada bantuan AS bagaimanapun dilihat sebagai lebih besarnya kebutuhan Beijing terhadap Washington ketimbang sebaliknya. Bagi AS, di satu pihak, satu-satunya sekutu yang dapat dipercaya dan diandalkan di kawasan Asia-Pasifik adalah Jepang. Sementara itu bagi Cina, di lain pihak, berbagai persoalan yang kembali menajam sejak kepemimpinan Ronald Reagan mendorongnya untuk menjaga jarak dengan Washington.

Pada saat yang sama, Beijing melihat Moskow sedang mengalami berbagai kesulitan di dalam negeri. Tawaran US yang

⁵Gary Klinworth, "China's Indochina Policy," *Journal of Northeast Asian Studies*, vol. VIII, no. 3 (Fall 1989): 25.

⁶McGregor, "China, Vietnam, and," 267.

berkali-kali untuk memperbaiki hubungan Beijing-Moskow, dipersepsikan oleh RRC sebagai mulai adanya penurunan ancaman US terhadapnya. Sikap diam Soviet ketika pecah pertempuran antara Cina dan Vietnam di Kepulauan Spratly bulan Maret 1988 memperkuat keyakinan Cina bahwa Soviet memang bersungguh-sungguh dengan tawaran normalisasinya.⁷ Peluang ke arah normalisasi penuh itu semakin terbuka dengan terpenuhinya tiga tuntutan yang selalu diajukan Beijing -- penarikan mundur pasukan Soviet dari Mongolia, perbatasan, dan Afghanistan -- sebagai prasyarat normalisasi. Dalam pertemuan antara Mikhail Gorbachev dan Deng Xiaoping bulan Mei 1989, kedua pemimpin negara komunis besar itu sepakat untuk mulai membuka babak baru dalam hubungan Moskow-Beijing. Cina tampaknya cukup menyadari bahwa dalam suasana *detente* AS-US, alternatif yang paling aman baginya adalah memapankan dan menjaga hubungan positif dengan kedua *superpower*.

Kedua, *perubahan kebijakan Indocina-Vietnam*. Sikap Cina yang berusaha menjaga jarak dengan AS mampu mengubah posisi Beijing di mata Moskow. Soviet menyadari bahwa hubungan baik dengan Beijing memiliki arti penting strategis yang lebih tinggi daripada hanya mempertahankan persekutuan yang ketat dengan Hanoi. Arti penting Cina bagi Soviet ini antara lain terlihat dari kesediaan Moskow untuk "mendesak" Hanoi agar bersikap lebih akomodatif terhadap Beijing. Hal ini mau tidak mau telah melemahkan posisi Vietnam sebagai penentang utama Cina di kawasan,⁸ sehingga ia tidak memiliki pilihan lain ke-

cuali ikut menunjukkan keinginan untuk memperbaiki hubungan dengan Cina. Hasrat Vietnam ini terlihat dari perubahan dalam politik luar negeri dan kebijaksanaan pertahanan Vietnam. Hanoi mulai bisa menerima suatu peranan yang lebih terbatas di Indocina, termasuk keputusan untuk menarik mundur pasukannya dari Kamboja.⁹

Sikap Vietnam yang melunak ini telah memperbesar harapan bahwa Cina akan menilai kembali bantuannya kepada kelompok Khmer Merah, yang selama ini menjadi salah satu faktor penghambat penyelesaian konflik Kamboja. Namun hal ini menjadi masalah bagi Beijing. Cina sulit untuk mengabaikan Khmer Merah sebelum ada penyelesaian konflik Kamboja yang tuntas, karena hal itu dapat melemahkan posisi Beijing dalam mencegah dan menangkal suatu penyelesaian yang mungkin akan menguntungkan Hanoi. Dengan demikian, tidak mengherankan kalau Beijing masih memperlihatkan sikap tidak percaya sepenuhnya terhadap penarikan pasukan Vietnam dari Kamboja. Ketidakpercayaan ini dijadikan alasan oleh Beijing untuk terus memberi bantuan kepada Khmer Merah.

Ketiga, *perubahan dalam kebijakan luar negeri Thailand*. Bangkok yang sebelumnya selalu bersikap keras terhadap Vietnam dan rezim Hun Sen di Kamboja, kini mulai berubah sejak Chattichai Choonhavan menjadi perdana menteri bulan Agustus 1988.¹⁰ Kegagalannya dalam mendukung CGDK dan realitas semakin kuatnya pemerintahan Hun Sen telah mendorong Thai-

⁹McGregor, "China, Vietnam, and," 273.

¹⁰Rizal Sukma, "Indonesia-Cina dan Stabilitas Asia Tenggara Pasca 8 Agustus," *Media Indonesia*, 31 Juli 1990.

⁷*Asia Yearbook 1989*, 108.

⁸Klinworth, "China's Indochina," 27.

land untuk mengubah kebijaksanaannya terhadap Indocina.¹¹ Secara terbuka Bangkok menegaskan niatnya untuk memulai suatu pendekatan terhadap Vietnam, Laos dan Kamboja dalam rangka mengubah kawasan Asia Tenggara daratan dari *a battlefield to a marketplace*. Sebagai implementasi dari kebijaksanaan baru itu, tanggal 9-12 Januari 1989 Menlu Siddhi Savetsila mengunjungi Hanoi dan tanggal 24-28 Januari 1989 Bangkok menerima kunjungan PM Hun Sen ke Thailand.

Cina tampaknya tidak begitu antusias terhadap "politik independen" Thailand ini. Beijing bahkan sempat menolak usul PM Chattichai untuk menggunakan perdagangan, investasi, dan kerjasama ekonomi sebagai alat untuk mendorong Vietnam dan Kamboja agar menerima suatu penyelesaian politik. Dalam pertemuannya dengan Chattichai yang berkunjung ke Beijing tanggal 14-17 Maret 1989, Deng Xiaoping menegaskan bahwa Cina tidak akan memberikan konsesi kepada Vietnam sebelum tercapainya suatu penyelesaian yang menyeluruh. Deng juga mengingatkan tentang masih perlunya suatu "front persatuan" antara Cina, Thailand, dan negara-negara ASEAN lainnya untuk menekan Vietnam.¹² Hanya saja, Cina harus mengakui bahwa ada realitas yang berubah di Asia Tenggara akibat perubahan kebijaksanaan Thailand ini, yaitu membaiknya hubungan Bangkok-Hanoi. Beijing tidak bisa lagi terlalu mengandalkan Bangkok sebagai mitra utama dalam penyusunan strategi bersama menentang Vietnam.

¹¹ *Foreign Broadcast Information Service-East Asia*, 31 Januari 1989, 62. Berikutnya disingkat FBIS-EA.

¹² Michael Richardson, "Thailand Embraces Indochina," *Pacific Defence Reporter* (Juni 1989), 21.

Keempat, *pencabutan pengakuan Washington terhadap kelompok perlawanan Kamboja pimpinan Sihanouk (CGDK)*. Washington yang sebelumnya memang sudah "risih" dalam mendukung CGDK karena di dalamnya ikut bergabung Khmer Merah, tanggal 18 Juli 1990 memutuskan untuk tidak lagi mengakui kursi CGDK di PBB. Washington memandang keputusan itu sebagai jalan terbaik untuk mencegah Khmer Merah kembali berkuasa di Kamboja. Pengakuan PBB terhadap CGDK yang memberi legalitas kepada Khmer Merah, oposisi pihak Kongres yang semakin kuat di AS, tidak tergoyahkannya Khmer Merah sebagai faksi terkuat dan keberhasilannya menguasai kembali sebagian wilayah Kamboja, menjadi dasar perubahan kebijaksanaan AS itu.

Keputusan AS itu telah mengubah karakteristik interaksi di Asia Tenggara dalam konteks konflik Kamboja. Dengan keputusan itu AS terpaksa menggeser posisi RRC dari mitra menjadi lawan dalam konflik Kamboja. ASEAN yang sebelumnya mendapat dukungan Washington dalam mendukung CGDK, kini terpaksa ditempatkan sebagai pihak yang memiliki strategi yang berbeda dengan AS. Dengan kebijaksanaan baru itu, untuk pertama kalinya AS berada di satu jalur dengan US dan Vietnam.

Pergeseran karakteristik interaksi demikian telah menempatkan Cina pada posisi "kerikuan diplomatik", karena kebijaksanaan baru AS itu mendapat dukungan dari sekutu-sekutu Baratnya, termasuk Thailand dan Uni Soviet. Moskow menyebutkan bahwa dengan keputusan itu AS "telah mengambil langkah besar dalam arah yang tepat", karena "adalah hal yang mustahil membayangkan stabilitas di Asia Tenggara tanpa adanya normalisasi hubungan AS

dengan Vietnam dan Kamboja".¹³ Dalam suasana demikian, jelas Cina merupakan satu-satunya pihak yang masih bertahan dengan perspektif lama dalam memandang Khmer Merah dan sikap ini jelas melawan arus opini internasional.

Sikap kukuh Beijing ini antara lain tercermin dari reaksinya terhadap Washington. Cina menyesalkan keputusan AS itu dan menegaskan bahwa pihaknya akan terus memberi bantuan militer kepada Khmer Merah sampai "tercapainya sebuah penyelesaian yang adil, menyeluruh dan masuk akal serta adanya bukti-bukti nyata bahwa pasukan Vietnam benar-benar telah ditarik seluruhnya". Menurut Cina, membiarkan kursi Kamboja di PBB kosong sebelum tercapainya sebuah penyelesaian komprehensif akan menjadi penghalang bagi usaha-usaha penyelesaian.¹⁴ Dalam konteks itu, keputusan AS dilihat Cina sebagai tidak memberi sumbangan apa pun baik bagi penyelesaian konflik Kamboja secara menyeluruh maupun bagi langkah-langkah berbagai pihak yang sudah berusaha ke arah itu.¹⁵

Reaksi Cina ini tampaknya memiliki kaitan erat dengan keputusan AS untuk memulai dialog langsung dengan Vietnam. Cina tampaknya khawatir pembukaan dialog Washington-Hanoi itu, yang pertama kali sejak berakhirnya Perang Vietnam tahun 1975, dapat meningkatkan posisi internasional Vietnam. Dengan demikian, Cina akan berada pada posisi sulit yang memiliki keterbatasan ruang gerak manuver dan dalam memperoleh keuntungan-keuntungan yang lebih besar dari konflik Kamboja. Hal ini dapat dimengerti karena selama lebih dari satu dekade, kepentingan Cina di Asia

Tenggara lebih dipusatkan pada upaya menekan ambisi Vietnam untuk tampil sebagai kekuatan dominan di kawasan. Warisan sejarah yang panjang dan penuh konflik dengan Vietnam, telah menempatkan Hanoi sebagai ancaman di mata Beijing.

Namun, implikasi positif keputusan AS terhadap konflik Kamboja mau tidak mau harus diakui sebagai sebuah terobosan yang memberi harapan lebih besar bagi penyelesaian secara politik. Pemerintahan Koalisi Demokratik Kamboja, terutama Khmer Merah, tidak memiliki pilihan lain kecuali menerima pembentukan SNC (*Supreme National Council*) menurut formula yang ditawarkan rezim Pnom Penh yang sebelumnya telah disepakati antara Hun Sen dan Sihanouk dalam pertemuan Tokyo. Kesepakatan mengenai fungsi dan komposisi SNC ini dicapai dalam pertemuan di Jakarta 9-11 September 1990.¹⁶ Dalam hal ini, Cina yang sebelumnya "kurang antusias" terhadap hasil pertemuan Tokyo ikut menyesuaikan diri pada perubahan yang ada dalam dimensi eksternal dan internal dari konflik Kamboja dengan menyatakan dukungan terhadap hasil pertemuan Jakarta itu.¹⁷ Untuk pertama kalinya pula Cina kemudian menyatakan bahwa pihaknya akan membuka kontak dengan rezim Hun Sen.¹⁸

Vietnam dan ASEAN: Antara "Lawan yang Kuat" dan "Mitra yang Sulit"

Seperti telah disinggung sebelumnya, tujuan strategis utama Cina di Asia Tenggara adalah mencegah lawan-lawannya mem-

¹³ *South China Morning Post*, 20 Juli 1990. Berikutnya disingkat SCMP.

¹⁴ *Straits Times*, 20 Juli 1990.

¹⁵ *Straits Times*, 1 Agustus 1990.

¹⁶ *Kompas*, 11 September 1990.

¹⁷ *Kompas*, 13 September 1990.

¹⁸ *International Herald Tribune*, 13 September 1990.

peroleh keuntungan dan mengembangkan posisi dominan di antara negara-negara tetangganya.¹⁹ Sejak invasi Vietnam ke Kamboja dan serangan Cina ke Vietnam tahun berikutnya, Cina menjalankan strategi kembar untuk mencapai tujuannya itu. Di satu pihak, Cina menjalankan strategi yang mengkombinasikan tekanan militer, diplomatik dan ekonomi terhadap Vietnam. Di lain pihak, Cina berusaha menggunakan pengaruhnya terhadap negara-negara ASEAN untuk membangun perimbangan kekuasaan di kawasan dalam melawan aliansi Soviet-Vietnam.²⁰

Permusuhan antara Beijing dan Hanoi mencakup berbagai masalah, mulai dari perbedaan ideologi, kebijaksanaan terhadap minoritas etnik Cina di Vietnam, klaim atas kepulauan di Laut Cina Selatan, sampai pada persoalan pengungsi. Namun, dari semua persoalan yang ada, masalah Kamboja merupakan pusat permusuhan antara Cina dan Vietnam.²¹ Cina melihat persoalan keterlibatan Vietnam di Kamboja memerlukan perhatian lebih, karena hal itu dapat mengancam keamanannya. Di samping itu, kejatuhan pemerintahan Khmer Merah dukungan Cina di Kamboja akibat penyerbuan Vietnam memperkuat persepsi ancaman Beijing terhadap maksud-maksud hegemoni Hanoi di Asia Tenggara, khususnya di Asia Tenggara daratan.

¹⁹Sheldon W. Simon, "China and Southeast Asia: Protector or Predator?" *Australian Outlook*, vol. 39, no. 2 (Agustus 1985), 95.

²⁰Robert G. Sutter, *Chinese Foreign Policy: Developments After Mao* (New York: Praeger Publisher, 1986), 191-192.

²¹William J. Duiker, "Looking Beyond Cambodia: China and Vietnam," *Indochina Issues*, no. 88 (Juni 1988): 1.

Namun, Cina harus mengakui bahwa Vietnam tidak mudah ditaklukkan. "Pelajaran pertama" yang diberikan Cina tidak membuat Vietnam mengambil langkah-langkah kompromi dalam masalah pendudukannya di Kamboja. Di samping itu, Vietnam juga mampu menunjukkan bahwa ia mampu menangkal tekanan-tekanan militer Cina di perbatasan secara efektif.²² Perkiraan Cina bahwa Vietnam akan memikul beban ekonomi yang berat akibat konfliknya dengan Cina, tidak sepenuhnya tepat. Karena, Soviet selalu siap menanggung biaya pertahanan dan beban ekonomi yang dipikul oleh Vietnam.²³

Di samping tindakan-tindakan yang dilakukannya secara unilateral, Cina juga berusaha membentuk suatu "front persatuan" melawan Vietnam. Untuk tujuan ini, Cina berusaha mempengaruhi negara-negara ASEAN untuk membentuk koalisi anti-Vietnam. Beijing melancarkan propaganda bahwa Vietnam adalah ancaman serius bagi keamanan dan stabilitas di Asia Tenggara dan harus dilawan bersama. Pada tingkat yang lebih global, Cina berusaha meyakinkan ASEAN bahwa Vietnam adalah alat Soviet dalam memperluas ekspansi pengaruhnya ke kawasan.²⁴ Invasi Vietnam ke Kamboja membuka peluang bagi Cina untuk menarik ASEAN ke pihaknya, terutama Thailand yang cukup khawatir terhadap maksud ekspansionis Vietnam di Asia Tenggara daratan.

Hubungan dengan Thailand ini, memberi keuntungan tambahan bagi Cina. Mela-

²²Klinworth, "China's Indochina," 25.

²³Charles McGregor, "The Sino-Vietnamese Relationship and the Soviet Union," *Adelphi Papers*, no. 232 (Autumn 1988): 52.

²⁴Choudhury, "Role of China," 183-184.

lui Thailand, Cina dapat menyalurkan bantuan militer kepada Khmer Merah yang menjadi alat Beijing dalam menekan Vietnam. Di samping itu, kerjasama militer Beijing-Bangkok memperkuat keterlibatan Cina secara strategis di Asia Tenggara. Alasan keterancaman pihaknya sebagai negara terdepan dalam menghadapi agresivitas Vietnam yang sering dikemukakan Thailand, membuat ASEAN tidak punya pilihan lain kecuali memberikan semacam persetujuan diam-diam (*tacit agreement*) terhadap semi-persekutuan antara Beijing dan Bangkok.

Meskipun demikian, di sisi lain Cina harus menghadapi kenyataan bahwa hubungannya dengan ASEAN diwarnai oleh berbagai persoalan. Pertama, Cina harus menghadapi warisan kecurigaan dari beberapa negara ASEAN yang sulit untuk dihapuskan begitu saja.²⁵ Selama lebih dari tiga dekade, Beijing dipandang sebagai sumber persenjataan bagi pemberontakan-pemberontakan komunis pro-Beijing di seluruh kawasan Asia Tenggara. Kedua, Cina tidak dipercaya sepenuhnya, terutama oleh Indonesia dan Malaysia, karena kecurigaan terhadap ambisi-ambisi regional Cina. Malaysia dan Indonesia lebih melihat Cina sebagai ancaman ketimbang Vietnam. Penyerbuan Vietnam ke Kamboja dipandang oleh kedua negara ini sebagai akibat dari ancaman Cina terhadap Vietnam.²⁶ Ketiga, Indonesia dan Malaysia tidak sepakat dengan cara-cara Beijing menghadapi Vietnam, karena hal itu dipandang dapat mempersulit penciptaan perdamaian dan stabilitas di kawasan, yang

pada gilirannya akan menghambat terbentuknya Asia Tenggara yang damai, bebas, dan netral.²⁷

Hanya saja, kesamaan tujuan antara Cina dan ASEAN mengenai masalah Kamboja, yakni penarikan mundur pasukan Vietnam dan penyelesaian intern antara faksi-faksi yang bertikai, membuat Cina memperoleh dukungan diplomatik dari ASEAN. Untuk itu, ia pun memberikan hal yang sama yakni memberikan dukungan terhadap upaya-upaya ASEAN dalam menyelesaikan konflik Kamboja, meskipun untuk hal ini tidak selamanya kedua belah pihak memiliki kesamaan pandangan terutama mengenai Khmer Merah. Paling tidak, dalam batas-batas tertentu Cina berhasil memperoleh keuntungan-keuntungan politik dari hubungan positifnya dengan ASEAN, di samping berbagai kesulitan yang dihadapi akibat sikap ASEAN yang kadang-kadang menjadi *uneasy partner* bagi Beijing.

Pengelolaan hubungan dengan ASEAN dan Vietnam yang memberikan keuntungan maksimal bagi Cina, dengan masalah Kamboja sebagai faktor pengait, semakin sulit bagi Beijing karena adanya perubahan-perubahan seperti yang dipaparkan di atas. Kecenderungan politik di kawasan Asia Tenggara sekarang ini, lebih mengarah kepada peredaan ketegangan (*detente*) regional. Beijing sendiri mengakui ada dua perkembangan mendasar dalam peta politik regional Asia Tenggara. Pertama, Cina mengakui dan menyambut baik menurunnya ancaman hegemonisme Soviet, namun ia tetap tidak puas dan masih memendam kecurigaan terhadap kerjasama Vietnam-Soviet. Kedua, Cina mengakui munculnya era peredaan ke-

²⁵Simon, "China and Southeast Asia," 94.

²⁶C.Y. Chang, "The Sino-Vietnam Rift: Political Impact on China's Relations with Southeast Asia," *Contemporary Southeast Asia*, vol. 4, no. 4 (Maret 1983): 540.

²⁷Sheldon W. Simon, "The Two Southeast Asias and China: Security Perspective," *Asian Survey*, vol. XXIV, no. 5 (Mei 1984): 527-528.

tegangan politik, namun bersamaan dengan itu Cina melihat kompetisi ekonomi di antara negara-negara semakin meningkat.²⁸

Dalam konstelasi politik global dan regional yang mengalami pergeseran karakteristik dari persaingan politik ke persaingan ekonomi, Cina mengikuti pandangan bahwa kekuatan ekonomi dan kemajuan teknologi menjadi komponen penting bagi kekuatan nasional serta semakin pentingnya faktor ekonomi dalam persaingan strategis internasional.²⁹ Dengan persepsi seperti ini, tidak ada pilihan lain bagi Beijing kecuali menyesuaikan diri dengan kecenderungan *detente* regional dan menghindari terjadinya ketegangan, sehingga ia dapat lebih memusatkan perhatiannya pada pembangunan ekonomi di dalam negeri.

Penyesuaian dalam Kebijaksanaan Cina: Strategi "Berjalan Atas Dua Kaki"

Dari keseluruhan perkembangan di Asia Tenggara sekarang ini, dapat dikatakan Cina telah berhasil mencapai beberapa tujuan utamanya.³⁰ Pertama, Vietnam telah menarik mundur pasukannya dari Kamboja. Kedua, kekuatan regional Vietnam mulai berkurang akibat berbagai kesulitan yang dihadapinya di dalam negeri, dan akibat dari berbagai perubahan dalam politik luar negeri Soviet di kawasan. Ketiga, posisi menonjol Cina di Indocina telah diterima dan

diakui oleh kedua superpower. Keempat, Cina mendapat pengakuan dari negara-negara ASEAN mengenai sikap kerjasamanya dalam menyelesaikan konflik Kamboja, meskipun masih diwarnai oleh perbedaan dalam memandang Khmer Merah. Kelima, melemahnya arti penting persekutuan Hanoi-Moskow. Keenam, Khmer Merah tetap diikutsertakan dalam keanggotaan SNC meskipun terpaksa menerima pengaturan menurut kesepakatan Tokyo.

Semakin dekatnya penyelesaian konflik Kamboja dan berakhirnya keterlibatan Vietnam di sana, akan menghadapkan Cina pada persoalan baru dalam menata strategi politik luar negerinya di Asia Tenggara. Pertama, bagaimana menata hubungan dengan Vietnam yang masih tetap dilihat sebagai ancaman terhadap keamanannya meskipun persepsi itu mulai mengalami pergeseran. Di samping itu persoalan klaim terhadap kepulauan di Laut Cina Selatan tetap potensial sebagai salah satu sumber konflik terbuka di masa mendatang. Kedua, bagaimana mendesain pola hubungan antara Cina dan negara-negara Indocina, terutama dengan Kamboja, yang dapat menutup peluang bagi munculnya kembali hasrat dominasi Vietnam di Asia Tenggara daratan. Ketiga, bagaimana mencegah kembalinya persepsi ancaman terhadap Cina di beberapa negara ASEAN sehubungan dengan hilangnya faktor pengait kerjasama berupa kepentingan bersama menentang Vietnam.

Tampaknya Cina sudah mengantisipasi berbagai kemungkinan perubahan di Asia Tenggara sejak awal. Untuk itu, sejalan dengan terjadinya perubahan-perubahan yang tidak selalu berada di bawah kendalinya, Cina mulai menunjukkan tanda-tanda bahwa ia akan melakukan penyesuaian dalam politik luar negerinya di Asia Tenggara,

²⁸Robert S. Ross, "China's Strategic View of South-east Asia: A Region in Transition," *Contemporary Southeast Asia*, vol. 12, no. 2 (September 1990): 101.

²⁹Ross, "China's Strategic View," 102.

³⁰Klinworth, "China's Indochina," 39-40.

yang antara lain dapat dilihat dari pernyataan Deng Xiaoping yang mengatakan:

Di dunia ini banyak sekali terjadi konflik. Untuk itu, harus dicari cara-cara penyelesaian untuk memecahkan konflik-konflik tersebut. Selama beberapa tahun yang lalu, saya telah memiliki beberapa gagasan untuk itu. Apakah cara yang terbaik untuk memecahkan masalah? Melalui cara-cara damai dan bukan melalui perang. Saya percaya cara-cara ini dapat menyelesaikan konflik-konflik yang ada.³¹

Sejak Vietnam mengumumkan kesediaannya untuk menarik mundur pasukannya dari Kamboja, Beijing memberikan semacam konsesi berupa janji untuk mengurangi dukungannya terhadap kekuatan Khmer Merah anti-Vietnam. Hal ini ditegaskan oleh PM Li Peng:

Kalau Vietnam dapat menetapkan waktu pengunduran pasukannya dari Kamboja sehingga memuaskan semua pihak, dan pada saat yang sama mengizinkan pengawasan internasional, maka bantuan militer terhadap keempat faksi di Kamboja harus dikurangi secara bertahap dan bahkan dihentikan sama sekali.³²

Cina telah mengurangi kekuatannya di sepanjang perbatasan Cina-Vietnam. Vietnam juga menarik pasukannya dari perbatasan. Wilayah Lao Shan yang diduduki oleh Tentara Pembebasan Rakyat (PLA) dikembalikan kepada petani setempat. Perdagangan di perbatasan Mong Cai dibuka kembali tanggal 5 Februari 1989. Menurut Cina, langkah-langkah ini dikarenakan adanya penurunan aktivitas militer Vietnam di perbatasan dan berkurangnya kehadiran Vietnam di Kamboja. Di samping itu, Cina juga mulai melakukan pembicaraan dengan Vietnam. Pada tanggal 13-17 Januari 1989, Wakil Menlu RRC Liu Shuqing mengada-

kan pembicaraan dengan Wakil Menlu Vietnam Dihn Nho Liem, dan pertemuan itu merupakan yang pertama kali sejak penyerbuan Cina tahun 1979.³³

Meskipun demikian, tampaknya Cina masih menyimpan kecurigaan bahwa walaupun Vietnam menarik mundur pasukannya dari Kamboja bisa jadi Hanoi akan melakukan intervensi kembali sekiranya diminta oleh rezim Hun Sen di Pnom Penh. Kecurigaan ini memang beralasan karena Vietnam tidak pernah menyebutkan bahwa ia tidak akan melakukan intervensi kembali. Dalam pandangan Cina, alasan untuk "mencegah kembalinya unsur-unsur pembantai Pol Pot ke Kamboja" pasca penarikan mundur Vietnam, bisa saja dipakai oleh Hanoi sebagai pembenaran sekiranya ia berniat untuk kembali ke Kamboja.³⁴ Artinya, Cina tidak memiliki jaminan kalau pada suatu saat Vietnam akan mencoba kembali mengambil keuntungan dari keadaan di Kamboja, yang masih rawan terhadap konflik bersenjata di antara mereka.

Ada empat kenyataan yang membuat Cina menyimpan kekhawatiran terhadap Vietnam. Pertama, perubahan kebijaksanaan AS mengenai Kamboja, diikuti oleh pembukaan dialog langsung antara Hanoi dan Washington.³⁵ Walaupun langkah itu belum segera diacukan pada normalisasi hubungan diplomatik, bukan tidak mungkin AS akan mengubah sikapnya yang selalu memveto pemberian bantuan kepada Vietnam oleh IMF dan Bank Dunia. Kedua, sekutu terdekatnya di Asia Tenggara, Thailand, sudah mulai menjalin hubungan dagang dengan Vietnam. Hal ini akan ikut membantu Viet-

³¹Klinworth, "China's Indochina," 33.

³²McGregor, "China, Vietnam, and," 277.

³³Klinworth, "China's Indochina," 33-34.

³⁴Klinworth, "China's Indochina," 35.

³⁵Bangkok Post, 7 Agustus 1990.

nam dalam menata kembali kehidupan ekonomi dalam negerinya. Ketiga, seperti yang dialaminya selama ini, Cina tidak selalu bisa menarik negara-negara ASEAN ke dalam koalisi anti-Vietnam. Indonesia dan Malaysia, misalnya, lebih memandang Vietnam sebagai mitra potensial ketimbang sebagai ancaman permanen. Keempat, penarikan mundur pasukannya dari Vietnam dan sikapnya yang mulai lebih fleksibel, telah memperbaiki citra Vietnam di mata negara-negara Barat. Keempat kenyataan ini telah memperkuat posisi Vietnam dalam opini internasional.

Secara demikian, agak sulit bagi Cina untuk tetap bersikap keras terhadap Vietnam. Berdasarkan kekhawatiran di atas, tampaknya Cina terpaksa harus menjalankan kebijaksanaan pendekatan (*policy of rapproachment*) yang hati-hati terhadap Vietnam. Seraya tetap mengingatkan berbagai masalah yang belum terselesaikan, bulan Januari 1990 Cina menyatakan keinginannya untuk segera melakukan normalisasi hubungan dengan Vietnam.³⁶ Bulan Mei 1990, titik terang ke arah kontak-kontak positif semakin terlihat dengan bertemunya Deputi Menlu Vietnam Ngo Din Lim dan Menlu RRC Qian Qichen untuk membicarakan berbagai persoalan di antara kedua negara, terutama masalah penarikan mundur pasukan Vietnam dari Kamboja.³⁷ Pembicaraan berikutnya, dilanjutkan pada bulan Juni 1990 di Hanoi antara Asisten Menlu RRC Xu Dunxin dan Wakil Menlu Vietnam Tran Guang Co. Perkembangan penting juga dapat dilihat ketika tiga pemimpin terkemuka Vietnam -- Sekjen PKV Nguyen Van Linh, PM Do Muoi, dan Pham Van Dong -- melakukan kunjungan rahasia ke Beijing

tanggal 3-4 September untuk bertemu dengan Jiang Zemin dan Li Peng. Dalam pertemuan itu kedua belah pihak sepakat untuk mengakhiri konflik Kamboja dan akan segera mengambil langkah-langkah normalisasi hubungan Beijing-Hanoi.³⁸

Dari proses perdamaian antara Cina dan Vietnam itu tampak ada hal yang menarik baik dari sikap Hanoi maupun Beijing dalam menilai hasil-hasil pembicaraan antara kedua belah pihak. Hanoi selalu menilai setiap pembicaraan sebagai memberikan "kemajuan, hasil yang menggembirakan, dan berlangsung dalam suasana akrab dan hangat". Sementara, di lain pihak Beijing kerap melontarkan komentar bahwa perundingan-perundingan itu memang bermanfaat tapi "tidak memberikan kemajuan-kemajuan yang berarti". Beijing selalu menyebutkan bahwa perundingan dan pembicaraan dengan Vietnam tidak ada artinya sebelum dicapai penyelesaian yang menyeluruh dalam konflik Kamboja.

Cina tampaknya berusaha untuk mengulur-ulur pembicaraan dengan selalu mengaitkan soal normalisasi dengan penyelesaian konflik Kamboja. Bahkan setelah terjadi perubahan dalam konstelasi konflik Kamboja akibat perubahan kebijaksanaan AS, PM Li Peng masih tetap menyatakan kesediaan pihaknya untuk menormalkan hubungan dengan Vietnam asal atas dasar penyelesaian damai Kamboja.³⁹ Tanggal 12 Agustus 1990, ketika berkunjung ke Singapura PM Li Peng kembali mengungkapkan syarat yang sama dengan menekankan bahwa hal itu penting artinya bagi pembicaraan secara damai mengenai masalah Spratly.⁴⁰ Kesan

³⁶ Antara, 13 Januari 1990.

³⁷ Kompas, 11 Mei 1990.

³⁸ SCMP, 26 September 1990.

³⁹ Antara, 24 Juli 1990.

⁴⁰ Antara, 14 Agustus 1990.

bahwa Beijing tidak ingin segera melakukan normalisasi dengan Hanoi ini semakin jelas ketika menjawab tanggapan Vietnam. Vietnam menyambut baik keinginan Cina untuk memperbaiki hubungan, bahkan Sekjen Partai Komunis Vietnam Nguyen Van Linh menyatakan bahwa ia siap untuk segera bertemu dengan Deng Xiaoping dalam suatu KTT yang akan membicarakan langkah-langkah normalisasi. Namun, Deng menolak usul Van Linh itu dan Cina kembali menegaskan bahwa hal itu baru bisa dilaksanakan setelah penyelesaian menyeluruh konflik Kamboja dicapai.⁴¹

Dalam negara-negara Indocina lainnya, sikap Cina juga mulai melunak meskipun ia yakin bahwa negara-negara di kawasan ini memiliki hubungan erat dengan Vietnam. Dengan Laos, misalnya, meskipun tentara Vietnam masih berada di sana, Beijing menerima kunjungan pemimpin Laos Kaysone Phomyihane pada bulan Oktober 1989. Menteri Hubungan Ekonomi dan Perdagangan Luar Negeri Cina Zheng Tuobin telah berkunjung ke Laos untuk membicarakan kemungkinan perluasan kerjasama perdagangan kedua negara. Pada tahun yang sama, sebuah delegasi "tidak resmi" Cina mengunjungi Pnom Penh,⁴² dan untuk pertama kalinya pula Cina kemudian menyatakan keinginannya untuk membuka dialog secara resmi dengan Hun Sen.⁴³

Sementara itu, seraya "mengulur-ulur" proses pendekatan dengan Vietnam dan melakukan pendekatan terbatas dengan Laos, Cina juga berusaha memperkuat hubungannya dengan negara-negara non-komunis

anggota ASEAN. Kunjungan PM Li Peng awal Agustus 1990 ke Indonesia, Singapura, dan Thailand untuk mencairkan hubungan diplomatik dengan Jakarta, menjajaki pembukaan hubungan formal dengan Singapura, dan memperkuat kembali "persekutuan" dengan Bangkok, memberi peluang bagi Cina untuk menegaskan kembali statusnya sebagai *great powers* yang berkepentingan di Asia Tenggara. Sebelum meninggalkan Bangkok, PM Li Peng menyebutkan kunjungannya itu sebagai "sangat berhasil dan telah meningkatkan status internasional Cina serta memperkuat saling pengertian dengan ASEAN".⁴⁴ Li juga mengatakan bahwa pembicaraannya dengan para pemimpin ketiga negara yang dikunjunginya itu akan "mempercepat tercapainya penyelesaian politik" masalah Kamboja.

Selama kunjungan itu, PM Li Peng kerap kali menegaskan pendekatan Cina yang lebih fleksibel terhadap Asia Tenggara. Pertama, Li Peng mengatakan bahwa meskipun Beijing akan tetap mendukung dan membantu Khmer Merah, pihaknya tidak ingin melihat Khmer Merah tampil sebagai kekuatan yang dominan di Kamboja.⁴⁵ Cina akan menghentikan bantuannya kalau pihak-pihak asing menghentikan campur tangannya dalam kemelut Kamboja. Kedua, dalam rangka menyelesaikan masalah Kamboja dan menciptakan stabilitas di Asia Tenggara, Cina bersedia melakukan normalisasi dan bekerjasama dengan Vietnam. Ketiga, Cina bersedia menempuh cara damai dalam menyelesaikan masalah Spratly dengan bekerjasama baik dengan negara-negara ASEAN maupun Vietnam.⁴⁶ Keem-

⁴¹SCMP, 24 Agustus 1990.

⁴²Ross, "China's Strategic View of," 106.

⁴³SCMP, 13 September 1990.

⁴⁴SCMP, 15 Agustus 1990.

⁴⁵SCMP, 15 Agustus 1990.

⁴⁶Far Eastern Economic Review, 30 Agustus 1990.

pat, Cina berjanji tidak lagi menjalin hubungan dan membantu partai-partai komunis yang ada di Asia Tenggara. Kelima, lebih khusus untuk Indonesia, Cina berjanji tidak memanfaatkan orang-orang Cina yang ada di Indonesia untuk kepentingan Cina.

Penegasan terhadap kelima hal di atas memang penting untuk meningkatkan kredibilitas Cina di mata negara-negara ASEAN. Sebuah Cina yang tidak lagi dipandang sebagai sumber instabilitas dan ancaman oleh negara-negara tetangganya, paling tidak untuk waktu dekat, merupakan hal yang penting bagi Beijing. Tampaknya Cina sadar atas keterbatasannya dalam mengontrol setiap perkembangan yang terjadi di sekitarnya. Dalam kondisi seperti ini, Cina terpaksa beralih pada tujuan yang lebih terbatas, yakni menciptakan sebuah lingkungan Asia Tenggara di mana negara-negara tetangganya tidak boleh bersekutu dengan musuhnya, dan berusaha mencegah Vietnam untuk memperoleh keuntungan-keuntungan lebih lanjut, walaupun tidak semua peluang yang muncul dari perkembangan itu dapat dimanfaatkan bagi kepentingan RRC.

Beberapa Tantangan Kebijakan Bagi Indonesia dan ASEAN

Dengan kecenderungan kebijakan seperti yang dipaparkan di atas, tampaknya Cina belum mau melepaskan strategi menekan Vietnam. Hanya saja, perkembangan yang mendekati penyelesaian konflik Kamboja telah mendorong Cina untuk bersikap lebih fleksibel. Sementara itu, kekhawatirannya terhadap maksud-maksud Vietnam di masa depan telah mendorong Cina untuk menegaskan kembali kepentingan dan keha-

dirannya di kawasan Asia Tenggara dengan memperbaharui kembali hubungannya dengan Jakarta, Singapura, dan Bangkok. Dengan strategi "berjalan atas dua kaki" ini, tampaknya Cina sedang berusaha mengontrol arah perkembangan Asia Tenggara agar kondisi yang tercipta nantinya akan memunculkan Cina sebagai aktor yang paling berpengaruh di kawasan. Kecenderungan seperti ini tampaknya menjadi obsesi Beijing terhadap prinsip bahwa tidak ada masalah di Asia Tenggara yang bisa diselesaikan tanpa kehadiran dan keikutsertaan Cina.

Dalam konteks pertentangannya dengan Vietnam ini, titik konflik lainnya yang perlu diamati adalah Laut Cina Selatan. Tindakan-tindakan Cina untuk memperkuat kehadirannya secara militer di kawasan ini, berikut pertempuran yang terjadi Maret 1988 dengan Vietnam, dapat pula dipandang sebagai bagian dari strateginya untuk menekan Vietnam. Yang menjadi persoalan adalah, meningkatnya konflik Cina-Vietnam mengenai kawasan ini akan melibatkan pula dua anggota ASEAN, Malaysia dan Filipina, yang juga memiliki klaim atas beberapa pulau di Laut Cina Selatan. Dengan kata lain, ASEAN akan menghadapi persoalan baru setelah konflik Kamboja, yakni konflik di Laut Cina Selatan yang lebih rumit dari konflik Kamboja.

Dalam perubahan dan perkembangan demikian, Indonesia dihadapkan pada dua tugas yang tidak ringan. Pertama, bagaimana mendesain kebijakan Asia Tenggara yang memberikan keuntungan optimal tanpa harus mengurangi perhatian kepada maksud-maksud regional Cina. Kedua, kebijakan itu harus memuat pilihan-pilihan yang memberi keleluasaan bertindak (*free-*

dom of action) secara unilateral tanpa harus menimbulkan kesan mengabaikan eksistensi ASEAN. Sedangkan bagi ASEAN sebagai satu kesatuan dihadapkan pada persoalan bagaimana membantu proses transformasi sisa-sisa pola hubungan *adversarial* menjadi pola hubungan *consensual*. Sasaran untuk ini adalah hubungan Vietnam-Cina, hubungan ASEAN-Indocina, dan Cina-Laos dan Kamboja. Acuan dari tantangan-tantangan demikian adalah menciptakan sebuah Asia Tenggara di mana tidak ada satu kekuatan pun, baik dari lingkungan Asia Tenggara sendiri maupun dari luar kawasan, yang bisa tampil sebagai kekuatan dominan yang dapat menimbulkan kecurigaan-kecurigaan terhadap maksud-maksud satu sama lain, atau tampil secara dominan dengan merugikan pihak yang lain.

Bagi Indonesia, perubahan-perubahan mendasar yang sedang terjadi di Asia Tenggara dan implikasinya bagi Cina ini memerlukan desain kebijaksanaan luar negeri yang lebih tepat. Untuk ikut menata hubungan internasional di Asia Tenggara pasca konflik Kamboja, Indonesia bisa mempertimbangkan dua preskripsi berikut ke dalam kerangka strategi politik luar negeri di Asia Tenggara di waktu mendatang dalam kaitannya dengan dua tantangan seperti yang dikemukakan di atas. Pertama, *menata model hubungan Cina-Indonesia-Vietnam yang mampu meminimalisasi perasaan keterancaman Hanoi terhadap Beijing*. Dalam hal ini Indonesia memupuk hubungan kerjasama dengan Cina, yang untuk sementara dipusatkan terlebih dahulu pada aspek perdagangan, seraya meningkatkan hubungan ekonomi dengan Vietnam. Tindakan seperti ini akan bermanfaat untuk memberi jaminan kepada Vietnam, bahwa hubungan Jakarta-Beijing tidaklah dijalin atas dasar yang da-

pat merugikan Hanoi.

Di samping itu, ia akan bermanfaat pula untuk mengejar ketinggalan dari Thailand yang sudah terlebih dahulu menjalankan kebijaksanaan seperti ini. Hanya saja, tindakan ini akan mempertajam kesan bahwa antara Indonesia dan Thailand terdapat semacam persaingan diam-diam dalam memainkan peran sebagai *regional power*. Namun, model hubungan demikian dapat menunjukkan bahwa tanpa harus mengikat diri ke dalam kerjasama militer dengan Cina, Indonesia mampu melibatkan Vietnam ke dalam struktur interaksi di Asia Tenggara yang bercirikan kerjasama ekonomi ketimbang konflik. Berbeda dengan model hubungan Cina-Thailand-Vietnam yang dikembangkan oleh Bangkok, model hubungan seperti ini dapat meminimalisasi kecurigaan Vietnam terhadap hubungan Indonesia-RRC.

Kedua, *mendukung model hubungan Thailand-Indocina yang sedang dibentuk oleh Bangkok*. Melalui tindakan seperti ini, Indonesia tidak perlu ragu dalam memberikan semacam pengakuan bahwa Thailand lebih berkepentingan untuk menjadikan dirinya sebagai pusat kegiatan ekonomi di Asia Tenggara daratan. Di samping itu, bentuk tindakan ini akan mengurangi kesan bahwa antara Indonesia dan Thailand sedang terjadi persaingan diam-diam. Sebagai kompensasi dari diversifikasi kerjasama ekonomi Thailand itu, Indonesia bisa memperluas kerjasama ekonomi dengan negara-negara ASEAN lainnya, seperti melalui model kerjasama Batam-Singapura-Johor.

Namun harus diakui tindakan demikian itu tampaknya seperti "melemahkan" posisi Thailand baik dalam hubungannya dengan Cina dan Vietnam maupun dalam kerangka

kerjasama negara-negara ASEAN. Sehingga bagi Bangkok tidak ada pilihan lain yang lebih rasional kecuali menjalin hubungan baik dengan Vietnam yang harus memperhatikan faktor Indonesia sebagai faktor yang ikut berperan dalam menata keadaan

di Asia Tenggara. Hal ini tentu saja jauh lebih baik karena dengan demikian Indonesia menempatkan dirinya pada posisi aktif ketimbang hanya reaktif atau "adaptif" terhadap kemauan Thailand seperti yang terjadi selama ini.



di Asia Tenggara. Hal ini tentu saja jauh lebih baik karena dengan demikian Indonesia menempatkan dirinya pada posisi aktif ketimbang hanya reaktif atau "adaptif" terhadap kemauan Thailand seperti yang terjadi selama ini.

di Asia Tenggara. Hal ini tentu saja jauh lebih baik karena dengan demikian Indonesia menempatkan dirinya pada posisi aktif ketimbang hanya reaktif atau "adaptif" terhadap kemauan Thailand seperti yang terjadi selama ini.